

## ABSTRAKSI

Studi ini menggali *Capacity Building* Aparatur Sipil Negara Kabupaten Maduratna yang diindikasikan memiliki kinerja kurang efektif dalam mendorong Kabupaten Maduratna terlepas dari kategori daerah tertinggal. Kabupaten Maduratna masuk dalam kategori daerah tertinggal dilihat dari beberapa faktor, antara lain IPM paling rendah se-Jawa Timur, tingkat kemiskinan tinggi, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap kinerja pemerintah belum optimal dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) masih di bawah standar.

Studi ini menggunakan metode *case study* untuk mengeksplorasi kasus aparatur negara di Kabupaten Maduratna yang didapat dari informasi dokumen meliputi; rekam jejak ASN, RPJMD, LKPJ, LKJIP, SAKIP dan IKM, sedangkan data primer didapat dari 18 informan yang kredibel dari berbagai latar belakang yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan manajemen ASN. Terdiri dari; sekretaris daerah, pejabat tinggi pratama, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pejabat fungsional, dan *Non Government Organization*.

Dari hasil studi dokumen dan data primer yang dikaji dengan teori *capacity building* dan *democratic local governance* menunjukkan hasil bahwa pada prinsipnya kemajuan suatu daerah tidak terlepas dari peran aktif dan profesionalitas kinerja aparatur. Pada tahapan ini, *capacity building* terutama pada level organisasi dan individu dapat diduga kurang memberikan dampak terhadap pencapaian tujuan strategis daerah, misalnya pada level organisasi salah satu faktor penempatan pejabat struktural dan fungsional belum mengedepankan relevansi antara pendidikan formal, kompetensi dan keahlian yang dimiliki dengan tugas struktural dan fungsional. Pada level individu aparatur, masih banyak ditemukan pelanggaran mulai dari pelanggaran ringan sampai pada pemberhentian dari status ASN. Selain itu, masalah disiplin dan kualifikasi pendidikan formal ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Maduratna masih relatif rendah. Sedangkan pada kajian *democratic local governance*, di mana dimensi utamanya pada akuntabilitas dan partisipasi masih terlihat di bawah standar. Pada level partisipasi menunjukkan bahwa kegiatan yang melibatkan partisipasi masyarakat hanya sekedar memenuhi syarat administratif atau *wish list* bukan masuk pada kegiatan yang substantif atau *need list*.

*Keywords: capacity building, ASN dan democratic local governance*